

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**MIRATUL QHAIRAT
NPM : 1902110013**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MIRATUL QHAIRAT
NPM : 1902110013

Dengan judul:

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2019-2021**

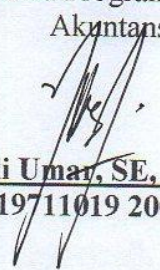
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

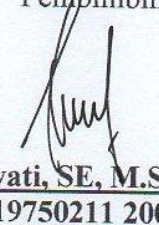
Menyetujui / Mengesahkan :

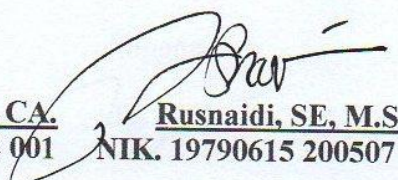
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tasniz Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

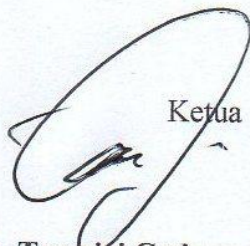
MIRATUL OHAIRAT
NPM : 1902110013

Dengan judul:

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2019-2021**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 04 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian


Ketua

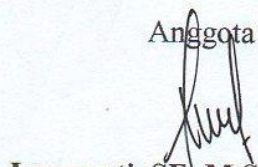
Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris



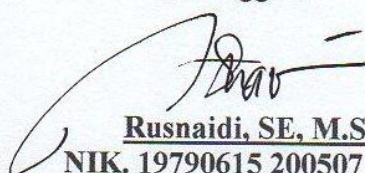
Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota



Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota



Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 14 Agustus 2023
Yang Menyatakan



METERAI
TEMBEL

SA545AJX017204510

MIRATUL QHAIRAT

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miratul Qhairat

NPM : 1902110013

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019-2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

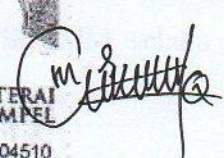
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan




MIRATUL QHAIRAT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2021”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Irmawati, SE, M.Si, AK, CA selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Rusnaidi SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Juli 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ASBTRAK	viii
ABSTRACT	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1,1 Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.2 <i>Value for Money</i> (VFM).....	11
2.1.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	13
2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran	13
2.1.5 Kinerja Keuangan Daerah	14
2.1.6 Rasio Efektivitas dan Efisiensi.....	14
2.2 Penelitian Sebelumnya	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian	22
3.1.2 Jenis Penelitian	23
3.1.3 Horizon Waktu	23
3.1.4 Unit Analisis	24
3.2 Sumber Dan Teknik Pengumpulan	24
3.3 Teknik Analisis Data.....	25
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.1.1 Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan	27

4.1.2	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan	28
4.1.3	Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan..	29
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan...	30
4.2.	Hasil Penelitian.....	32
4.2.1	Proses Penyusunan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan	32
4.2.2	Efisiensi Belanja dan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan	35
4.2.3	Efektifitas Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan....	37
4.2.4	Efektifitas Belanja Operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan	39
4.2.5	Efektifitas Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan....	39
4.3.	Pembahasan dan Pembahasan	40
4.3.1	Efisiensi Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan....	40
4.3.2	Efektifitas Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan....	42
4.3.3	Efektifitas Belanja Operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan	45
4.3.4	Efektifitas Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan....	47
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan.....	49
5.2.	Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA.....		51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan 2019-2020	5
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 3.1 Horizon Waktu	24
Tabel 3.2 Nilai Efektif PAD Secara Umum.....	26
Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Efisien Belanja Daerah Secara Umum.....	26
Tabel 4.1 Realisasi pendapatan dan Realisasi belanja Bappeda Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019-2021	36
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021....	38
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021	39
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021	40
Tabel 4.5 Realisasi pendapatan dan Realisasi belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021	41
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021.....	42
Tabel 4.7 Realisasi Belanja Operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021	45
Tabel 4.8 Realisasi Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Value For Money</i> (VFM) Secara Skematis.....	13
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	23

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah	53

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN TAHUN 2019-2021**

**MIRATUL QHAIRAT
NPM : 1902110013**

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA
Pembimbing II : Rusnaidi, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait upaya efisiensi pada satuan kerja Pemerintah Daerah dan untuk menganalisis tingkat efektif dan efisien Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada efektivitas dan efisiensi belanja anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Objek dalam penelitian ini yaitu efektivitas dan efisiensi belanja anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik, merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 dengan tingkat kemampuan keuangan cukup efisien disebabkan adanya kebutuhan yang harus dilakukan atau dilaksanakan pada tahun 2019 baik dari segi fisik maupun non fisik, kemudian pada tahun 2020 penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh dengan tingkat kemampuan keuangan tidak efisien dan pada tahun 2021 penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh dengan tingkat kemampuan keuangan sangat efisien. Artinya penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019-2021 dengan kemampuan keuangan daerah berfluktuasi (penurunan dan peningkatan).

Kata Kunci: *Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Realisasi Anggaran*

*ANALYSIS OF BUDGET PREPARATION IN REGIONAL FINANCIAL AND
ASSET MANAGEMENT REVENUE DEPARTMENT OF ACEH SELATAN
REGENCY IN 2019-2021*

MIRATUL QHAIRAT
NPM : 1902110013

Advisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA

Advisor II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out in more depth regarding efficiency efforts in the Regional Government work units and to analyze the effective and efficient level of the South Aceh District Government in realizing the Regional Revenue and Expenditure Budget. The method of data analysis in this study is descriptive, namely a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field that is focused on the effectiveness and efficiency of budget spending at the Revenue Service, Financial Management and Regional Assets of South Aceh Regency. The object of this study is the effectiveness and efficiency of budget spending at the Regional Financial and Asset Management Revenue Service of South Aceh Regency. The results of the study show that the implementation of budgeting at the regional financial and asset management revenue service of South Aceh Regency is carried out by preparing and compiling strategic plans, formulating visions, missions, key success factors, goals, objectives and strategies of the Regional Financial and Wealth Management Office of Aceh Regency South. The preparation of the revenue budget at the Regional Financial and Asset Management Revenue Service of South Aceh Regency in 2019 with a fairly efficient level of financial capability is due to a need that must be carried out or implemented in 2019 both in terms of physical and non-physical, then in 2020 the preparation of the revenue budget at the Office Aceh Regency Regional Financial and Asset Management Income with an inefficient level of financial capacity and in 2021 the preparation of a revenue budget at the Aceh Regency Regional Financial and Asset Management Revenue Service with a very efficient level of financial capacity. This means that the preparation of the revenue budget at the South Aceh Regency Regional Financial and Asset Management Revenue Service for 2019-2021 with regional financial capabilities fluctuating (decreasing and increasing).

Keywords: Effectiveness, Efficiency and Budget Realization Ratio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Fuad dan Sukarno (2020:2) Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa mendatang. Karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting. Artinya, segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga pencapaian efisiensi dan efektivitas dapat diukur dari kegiatan yang dilakukan. Secara lebih substansial, penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang.

Peraturan ini ditetapkan tanggal 19 September 2022 dan diundangkan tanggal 23 September 2022. Isi dalam peraturan ini adalah hal yang berhubungan dengan penyusunan APBD, meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya. APBD Tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa target, kinerja pada suatu instansi pemerintah, program, dan kegiatan yang tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pengaturan pada perencanaan diharapkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga bisa menciptakan ekonomis, efektif dan efisien dalam menggunakan belanja daerah dengan output dan income yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat di pertanggung jawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas. Dalam line item *budgeting* pengeluaran-pengeluaran yang tidak terukur secara jelas jumlah yang dikeluarkan, hanya sebatas pada penambahan dan pengurangan anggaran berdasarkan anggaran pada tahun sebelumnya dan tidak adanya standar biaya yang jelas menyebabkan anggaran biaya ini kurang objektif dan rawan dimanipulasi.

Menurut Asman (2022:7) proses penyusunan anggaran suatu anggaran memerlukan proses dalam penyusunannya. Penyusunan anggaran merupakan perpaduan proses akuntansi dan juga proses manajemen. Proses akuntansi memiliki arti bahwa penyusunan anggaran merupakan studi terhadap mekanisme, prosedur untuk merakit data dan membentuk anggaran. Sedangkan berdasarkan proses manajemen berarti penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peranan tiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian program. Penyusunan anggaran perlu dilakukan dalam beberapa tahap, agar perencanaan anggaran dapat berjalan secara efektif. Adapun proses penyusunan anggaran yaitu:

1. Tahap penentuan pedoman anggaran.
2. Tahap persiapan anggaran.

3. Tahap penentuan anggaran.
4. Tahap pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam perusahaan, Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan (Astuti dan Purba, 2021:3). Selain itu penyusunan anggaran merupakan rancangan perkiraan yang disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan arahan dan terapan suatu pedoman penyusunan anggaran yang dibuat secara terinci dan jelas, guna memudahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Prosedur penyusunan anggaran dimulai dari pengumpulan data dari tiap-tiap bagian yang selanjutnya dari hasil analisa tersebut menghasilkan susunan suatu rancangan anggaran yang selanjutnya distribusikan kepada setiap manajer bagian yang akan menginformasikan kepada bawahannya.

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja, alat mengkoordinasi kerja dan alat pengawasan kerja. Fungsi anggaran sebagai pedoman kerja adalah anggaran akan berfungsi sebagai pedoman kerja dan pemberi arahan bagi karyawan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi target kerja dan jadwal kerja pada periode tersebut. Fungsi anggaran sebagai alat mengkoordinasikan kerja adalah anggaran akan berguna sebagai sarana bagi setiap departemen untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang selaras. Fungsi anggaran sebagai pengawas kerja adalah anggaran akan bertugas untuk menilai apakah target yang telah dibebankan kepada karyawan dapat direalisasikan seluruhnya, sebagian atau tidak dapat direalisasikan. Manajemen juga akan

melakukan analisis varians, di mana manajemen akan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian (Astuti 2021:4).

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang sangat penting yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara transparan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja guna dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien. Efektif pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektif merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*) dan apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*Outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Sedangkan pengukuran efisien dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*Cost of Output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah–rendahnya (*Spending Well*). Dengan demikian APBD merupakan sarana untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui kegiatan dan program yang telah melalui perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang manfaatnya harus benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Penggunaan Anggaran Belanja pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase
2019	38.799.066.766	31.390.530.571	7.408.536.195	80,91%
2020	32.960.220.463	30.510.567.676	2.449.652.787	92,57%
2021	314.012.708.787	312.956.316.672	1.056.392.115	99,66%

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan (2022).

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu jumlah anggaran belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, namun jumlah sisa anggaran masih tersisa di atas Rp 1.000.000.000 dalam pertahun sehingga menjadi permasalahan dalam penelitian ini, pada tahun 2019 jumlah sisa anggaran belanja sebesar Rp. 7.408.536.195 dengan tingkat persentase sebesar 89,91%, pada tahun 2020 jumlah sisa anggaran belanja sebesar Rp. 2.449.652.787 dengan tingkat persentase sebesar 92,57% dan pada tahun 2021 jumlah sisa anggaran belanja sebesar Rp. 1.056.392.115 dengan tingkat persentase sebesar 99,66%.

Permasalahan dalam penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. adalah masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain sistem perencanaan yang belum optimal, kompetensi SDM yang masih rendah, kurangnya dana yang tersedia serta kurangnya koordinasi lintas Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan sehingga tidak sinkron dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan daerah. Akibat dari permasalahan tersebut adalah dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang

dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian dalam penyusunan anggaran belum tentu efektif dan tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Aceh, keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan atau penyusunan anggaran.

Hasil Penelitian dari Fanda Jessica Mantang (2020), membahas penelitian tentang Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran adalah baik, bahkan dalam pelaksanaannya persiapan sudah sesuai dengan kaidahnya dan hasil analisis varians belanja (deviasi) dari tahun anggaran 2016-2018 adalah masih menguntungkan karena realisasinya masih lebih rendah dari yang dianggarkan. Sebagaimana Penelitian dari Tia Setiani (2019). Membahas mengenai Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah melebihi jumlah yang dianggarkan dengan persentase diatas 90%. Realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Tingkat kemandirian sebesar 22.65%.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada pembahasan terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas dalam latar belakang terdahulu, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “bagaimana penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait upaya efisiensi pada satuan kerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis tingkat efektif dan efisien Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan Analisa Penyusunan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan peningkatan kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dan bahan masukan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang kinerja keuangan dan tingkat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas diatas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada objek penelitian dan bagaimana analisis penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Akuntansi Sektor Publik

1.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Maka dari itu analisis dan teknik akuntansi yang diaplikasikan pada pengelolaan keuangan di lembaga tinggi negara. Akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

Menurut Monika Handayani (2019:2). pengertian sektor publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”. Sektor Publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan Negara.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

1.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan Akuntansi Sektor Publik Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) secara umum tujuan akuntansi pemerinah adalah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Tujuan akuntansi pemerintah secara khusus dijelaskan oleh Hasanah dan Fauzi (2017), antara lain:

1. Akuntabilitas.
Kewajiban sektor publik dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Hasanah dan Fauzi, 2017).
2. Manajerial
Akuntansi pemerintah membantu dalam penyusunan APBD dan strategi pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis (Hasanah dan Fauzi, 2017).
2. Pengawasan
Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan manajerial atau operasional (Hasanah dan Fauzi, 2017). Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi pada sektor publik antara lain :
 - a. Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam alokasi mengelola sumber daya secara efisien dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2018).
 - b. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk manajer melaporkan pelaksanaan tanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publikatass penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan definisi diatas maka tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, memberikan informasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kelompok dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi laba non pemerintahan dan organisasi non laba non pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah lainnya seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik dan lain sebagainya).

Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintah (Pemerintah Pusat, Kementrian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, harus mengikuti standar pemerintah (SAP) seperti dimaksudkan dalam UU No 17/2003 Pasal 32 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 Pasal 51 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah.

1.1.2 *Value For Money* (VFM)

Value for Money merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari input, output dan outcome. *Value for Money* menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas tersebut secara bersama-sama.

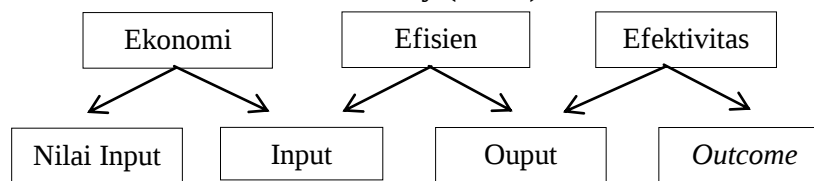
Menurut Mardiasmo (2018:5), *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sector publik memperhatikan *Value for Money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Ekonomi adalah perolehan masukan (*Input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisien, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran/ masukan (*output/input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektif, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana, efektif merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok VFM, sedangkan tambahannya dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*Equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*Social Opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*Equality*). Penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

Gambar 2.1
Gambar Value For Money (VFM) Secara Skematis



Sumber: Renyowijoyo (2019:05)

1.1.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan menurut Bastian (2019:189), “APBD merupakan penjabaran rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Jenis anggaran sektor publik, menurut Indra Bastian (2019:164) adalah

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (*Budget of state*).
- b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik swasta.

1.1.4 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Selain itu juga menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA.dan pembiayaan, yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (Fitra 2019:36).

Tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan *fiscal* dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas dalam belanja.

1.1.5 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2018:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2018:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

1.1.6 Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas dan rasio efisiensi merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah. Keuangan daerah dianalisis agar masalah-masalah dan peluang terhadap aktivitas keuangan daerah dapat terselidiki secara detail. Penganalisaan terhadap penerimaan daerah dan penganalisaan terhadap belanja. Penganalisaan terhadap penerimaan daerah

merupakan suatu usaha pengamatan kinerja keuangan daerah yang mengacu pada aktualisasi pendapatan dan perkiraan pendapatan. Sedangkan penganalisaan terhadap belanja daerah merupakan suatu usaha pengamatan kinerja keuangan daerah yang mengacu pada penggunaan APBD (Pramita, 2015).

Rumus rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim (2018:169)

Rumus rasio efisiensi :

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Sumber: Mahmudi (2017: 152)

Tingkat efisien dan efektifnya keuangan daerah dapat dilihat melalui kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan dikatakan efisien apabila persentase dari hasil perhitungan rasio efisiensi berada dibawah 60% namun apabila persentase tersebut lebih dari 100% maka keuangan daerah dikatakan efisien. Berbeda dengan efektivitas keuangan daerah. Keuangan daerah dapat dikatakan efisien apabila persentase dari hasil perhitungan rasio berada di atas 100% namun apabila persentase tersebut berada di bawah 60% maka keuangan daerah dikatakan sangat tidak efektif.

1.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Harahap (2022) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). Hasil Tinjauan Akuntansi Syariah menunjukkan bahwa Penyusunan Anggaran Belanja Langsung sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan anggaran yang mengikuti standar penyusunan pada aturan pemerintah yang sesuai dengan prinsip Akuntansi Syariah dari Aspek Pertanggung Jawaban.

Penelitian dari Hidayat (2022) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dari proses penyusunan anggaran sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 38 Tahun 2018. Pelaksanaan program anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya selama tahun anggaran 2018 dan 2019 menurut PMK No.249/PMK.02/2011 masuk dalam kriteria cukup baik, Pada tahun anggaran 2018 laporan realisasi anggaran di peroleh hasil varian Pendapatan Sangat Baik, Pendapatan Asli Daerah Sangat Baik, Pendapatan Tranfers Sangat Baik, Lain Lain Keuangan yang sah Sangat Baik, Belanja Sangat Baik, Belanja Operasional Sangat Baik, Belanja Modal Sangat Baik, Belanja tidak Terduga Kurang baik, Tahun anggaran 2019 Pendapatan Sangat Baik, Pendapatan Asli Daerah Sangat Baik, Pendapatan Tranfers Sangat Baik, Lain Lain Keuangan yang sah (Sangat Baik, Belanja Sangat Baik Belanja Operasional,Sangat Baik Belanja Modal Sangat Baik Belanja tidak Terduga Kurang baik.

Noveka (2021) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Beserta Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019. Hasil pengamatan tersebut menunjukan bahwa penyusunan anggaran dan laporan realisasi pada instansi pemerintah harus sesuai dengan standard yang ada. Kata Kunci: Analisis Penyusunan Anggaran, Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran

Jessika (2020), membahas penelitian tentang Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran adalah baik, bahkan dalam pelaksanaannya persiapan sudah sesuai dengan kaidahnya dan hasil analisis varians belanja (deviasi) dari tahun anggaran 2016-2018 adalah masih menguntungkan karena realisasinya masih lebih rendah dari yang dianggarkan.

Penelitian dari Hutapea (2020). membahas penelitian tentang Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Proses Penyusunan Anggaran sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dari hasil analisis penelitian ini, dapat dikemukakan saran bahwa Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat mempertahankan proses penyusunan anggaran yang sudah baik. Secara rinci hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara) (Harahap, 2022)	Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif.	Hasil Tinjauan Akuntansi Syariah menunjukan bahwa Penyusunan Anggaran Belanja Langsung sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan anggaran yang mengikuti standar penyusunan pada aturan pemerintah yang sesuai dengan prinsip Akuntansi Syariah dari Aspek Pertanggung Jawaban. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung telah melibatkan seluruh komponen pihak yang berwenang yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dari aspek keadilan	Penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang penyusunan anggaran, dan penyusunan laporan realisasi anggaran. Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.
2.	Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Hidayat, 2022)	Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dari proses penyusunan anggaran sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 38 Tahun 2018. Pelaksanaan program anggaran pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya selama tahun anggaran 2018 dan 2019 menurut PMK No.249/PMK.02/2011 masuk dalam kriteria cukup baik	Penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang penyusunan anggaran, dan penyusunan laporan realisasi anggaran. Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.
3.	Analisis Penyusunan Anggaran Beserta Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019 (Noveka, 2021).	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.	Hasil pengamatan tersebut menunjukan bahwa penyusunan anggaran dan laporan realisasi pada instansi pemerintah harus sesuai dengan standard yang ada. Kata Kunci: Analisis Penyusunan Anggaran, Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran	Sama-sama meneliti tentang penyusunan anggaran dan menyajikan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah. dengan menggunakan metode deskriptif.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. waktu dan tempat penelitian.

Tabel 2.2
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Jessica (2020)	Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran adalah baik, bahkan dalam pelaksanaannya persiapan sudah sesuai dengan kaidahnya dan hasil analisis varians belanja (deviasi) dari tahun anggaran 2016-2018 adalah masih menguntungkan karena realisasinya masih lebih rendah dari yang dianggarkan.	Penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang penyusunan anggaran, dan penyusunan laporan realisasi anggaran. Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.
5.	Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Hutapea, 2020).	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Proses Penyusunan Anggaran sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dari hasil analisis penelitian ini, dapat dikemukakan saran bahwa Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat mempertahankan proses penyusunan anggaran yang sudah baik.	Penelitian ini adalah sama-sama menganalisis penyusunan anggaran, dan penyusunan laporan realisasi anggaran. rasio efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan metode deskriptif	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.

Sumber: Data diolah, 2023

1.3 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk

memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

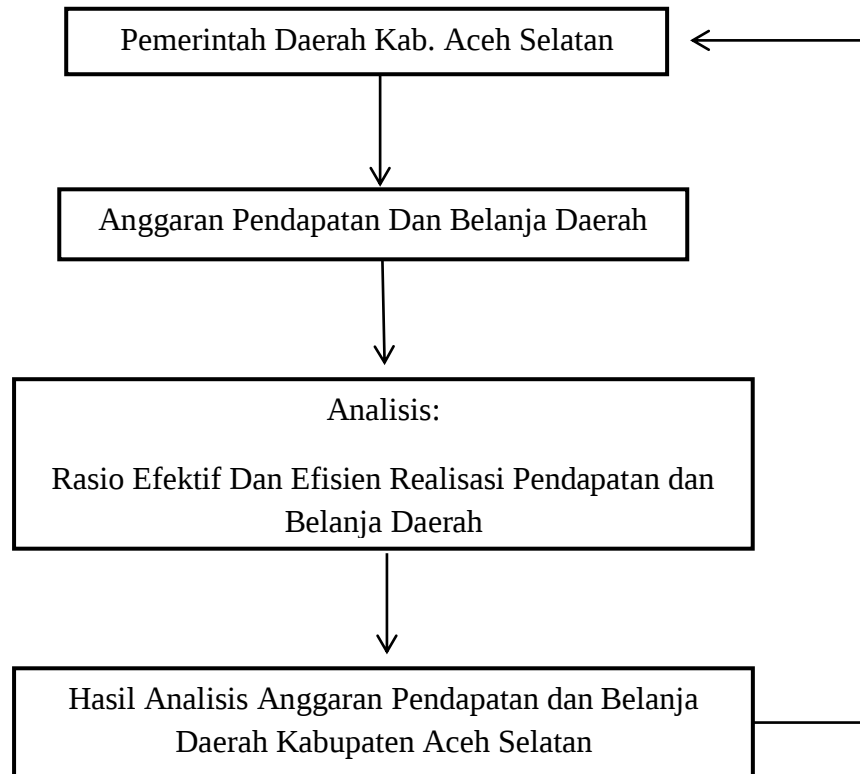
Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. (Halim, 2018:212).

Dalam Penelitian ini, Penulis meneliti tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pendapatan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Serta belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas berupa efektif dan efisien atau kinerja perencanaan program yang telah dicapai, dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio efektif pendapatan dan efisien belanja yaitu untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merealisasikan APBD yang ada dengan jumlah dan waktu yang tepat dan rasio efisien belanja yaitu untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka digunakan alur dari kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Sumber: (Renyowijoyo, 2019) dan dimodifikasi oleh peneliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk menghasilkan kerangka kerja yang akan digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya dikarenakan semua yang akan dilakukan telah terencana berdasarkan urutan penelitian dan merupakan suatu skema yang mencakup semua program penelitian.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang “Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan” untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu dan dinas/kantor keuangan yang ada di Aceh Selatan.

3.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis tertarik mengambil objek penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jln. T. Ben Mahmud, Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Dinas yang bergerak dalam bidang mengelola keuangan dan menyusun anggaran daerah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana pada metode ini penulis melakukan analisa terhadap objek penelitian yang diangkat serta melakukan studi kasus untuk memberikan informasi sesuai dengan kasus yang diangkat.

Menurut Sukmadinata (2011:73), menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif kualitatif ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi”.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi longitudinal (membujur, memakan waktu yang lama), yaitu data variabel yang dikumpulkan secara bertahap (dua atau lebih) dalam batas waktu periode tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Menurut Sugiyono (2018) deret waktu (*Time Series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis *Time Series* mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan dan tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu.

Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 3.1
Horizon waktu

No	Kegiatan Penelitian	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli
1.	Pengajuan Judul							
2.	Survei Awal							
3.	Penyusunan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Revisi Proposal							
6.	Observasi Lapangan							
7.	Penulisan Skripsi							
8.	Ujian Komprehensif							

xumber : Diolah Penulis

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis yang dianalisis dalam penelitian ini adalah informasi yang berkenaan dengan penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang secara langsung memberikan informasi atau data kepada penulis yang diambil dari lokasi tempat penelitian yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah .

2. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari informasi studi kepustakaan dan internet yang ada kaitannya dengan penelitian mengenai Analisis

penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah .

Teknik Pengumpulan data terdiri atas :

1. Metode Observasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung baik terhadap karyawan dan hasil kinerja.

2. Metode Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pimpinan Dinas dan pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi.

3. Metode Studi Literatur

Merupakan sebuah proses pencarian berbagai hasil kajian studi yang akan berkorelasi dengan penelitian yang sedang kamu lakukan.

3.3 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yakni suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Data laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut:

1. Analisis Efisien Belanja Daerah

Rasio efisien belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Efisiensi belanja dapat diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Sumber: (Mahmudi, 2017: 152)

Tabel 3.3
Kriteria Tingkat Efisien Belanja Daerah Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efisien	< 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup efisien	80% - 90%
Kurang efisien	90% - 100%
Tidak efisien	> 100%

Sumber : (Mohamad Mahsun: 2006)

2. Analisis Efektivitas Belanja Daerah

Rasio efektif pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan target belanja (yang dianggarkan) pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target. Secara umum nilai efektif penerimaan PAD dapat dikategorikan sebagai berikut, dapat diukur dengan menggunakan Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim (2018:169)

Tabel 3.2
Nilai Efektif Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber : (Mohamad Mahsun: 2006. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 05 Tahun 2008, Qanun Nomor 11 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 07 Tahun 2016 merupakan salah satu Instansi yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan membuka partisipasi masyarakat.

Sebagai unit organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, BPKD Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tantangan besar yang melekat pada nama yang disandangnya yakni disamping suatu SKPD (Satuan Kerja Pengelolaan Daerah) yang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, BPKD juga mempunyai tanggungjawab kepada Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Pusat sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD/PPKD). Ini merupakan tugas berat yang diemban BPKD dalam kurun waktu yang singkat pembentukannya sebagai salah satu unit kerja Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dimana BPKD menghadapi berbagai penyesuaian dan pembenahan dalam lingkungan BPKD sebagai SKPD dan sebagai SKPKD.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai visi Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang Terarah, Akuntabel dan Transparan. Disamping itu, untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem penyusunan anggaran *Egovernment* yang terarah dan trnasparan
2. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel
3. Menciptakan fungsi bendahara penerimaan dan pengeluaran sebagai jabatan fungsional yang bertanggung jawab tanpa intervensi
4. Menyusun laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan kabupaten Aceh Selatan secara tepat waktu
5. Meningkatkan penerimaan asli daerah secara signifikan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Sejalan dengan uraian di atas maka tugas pokok yang diberikan untuk melaksanakan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
2. Pelaksanaan pelayanan umum;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana di atas, maka pada prinsipnya tugas dan fungsi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa dilimpahkan oleh kepala daerah;
- g. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

- h. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- i. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBK;
- j. Memberikan unjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- k. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- l. Menetapkan SPD;
- m. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- o. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- p. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan mengacu kepada Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 05 Tahun 2008, Qanun Nomor 11 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 07 Tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan merupakan lembaga pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Selatan. Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Perda tersebut terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Program dan keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Pendapatan dan Penagihan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 2. Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan;
 3. Sub Bidang Pengembangan Pertimbangan dan Keberatan.
4. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Anggaran Pembiayaan;
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
5. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Verifikasi;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 3. Sub Bidang Belanja Langsung.
6. Bidang Akuntansi, membawahi:
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Perhitungan Keuangan;
 3. Sub Bidang Pembukuan.
7. Bidang Kekayaan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Sistem Informatika;

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan pemeliharaan Kekayaan Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Pelaksanaan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan :

1. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik
2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan
3. Merumuskan indikator kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama.
5. Mengukur pencapaian kinerja dengan :
 - a) perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target;
 - b) perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya;
 - c) Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain.

6. Melakukan evaluasi kinerja dengan :

- a) menganalisis hasil pengukuran kinerja
- b) menginterpretasikan data yang diperoleh
- c) membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program
- d) membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Air, termasuk Kabupaten Aceh Selatan diharuskan menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat RPJM berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum rencana kegiatan untuk lima tahunan, maka proses penyusunan dokumen ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan yang partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pelaku pembangunan, terutama jajaran pemerintah daerah (eksekutif), DPRK (legislatif), tokoh masyarakat, pemuda, pemuka agama, LSM, asosiasi dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Kendati substansi RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, namun seluruh rencana indikatif program/kegiatan yang dimuat merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders).

RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 – 2018 memberi landasan pemikiran yang rasional tentang hasrat dan upaya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan sebagai pihak yang terlibat dan terkait. Ini menunjukkan bahwa diperlukan penyelarasan antara kemauan dan kemampuan bersama dalam

penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Selanjutnya kemudian RPJM tersebut harus menggambarkan rencana pembangunan yang terukur baik anggaran maupun target capaian yang diinginkan dalam rangka melakukan perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik.

RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 – 2018 sudah dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dengan menggunakan anggaran APBK serta melibatkan peran masyarakat swasta daerah dan nasional. Kendati demikian, belum semua program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 dapat dilaksanakan secara sempurna. Akibatnya tentu capaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) masih belum terpenuhi secara sempurna. Banyak factor yang menyebabkan RPJM Kabupaten Aceh Selatan ini tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, alasan klasik menyangkut ketersediaan anggaran dianggap sebagai variable dominan disamping terjadinya bencana alam dan pengaruh eksternal lainnya.

Penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran didasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan value for money. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRK dan masyarakat umum. Sedangkan *value for money* mengandung tiga prinsip, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi dimaksudkan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang lebih murah.

Efisiensi berarti penggunaan anggaran publik dapat menghasilkan output yang maksimal dan berdaya guna. Sementara efektivitas berarti penggunaan anggaran diupayakan mencapai target atau sasaran bagi kepentingan publik. Kebijakan lainnya adalah memprioritaskan anggaran pembangunan kepada sektor-sektor ekonomi yang cepat tumbuh, dengan tidak mengenyampingkan sektor-sektor pembangunan lainnya. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan kinerja pada tahun ini, diakui belum diikuti dengan tingkat pencapaian yang optimal setiap indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain sistem perencanaan yang belum optimal, kompetensi SDM yang masih rendah, kurangnya dana yang tersedia serta kurangnya koordinasi lintas SKPD sehingga tidak sinkron dalam menghadapi berbagai masalah pembangunan daerah.

4.2.2 Efisiensi Belanja dan Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja dan pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan digunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Perhitungan efisiensi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019

$$= \frac{31.390.530.571}{35.190.546.895} \times 100\% = 89,20\%$$

- b. Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020

$$= \frac{30.510.567.676}{27.620.861.172} \times 100 = 110,46\%$$

- c. Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021

$$= \frac{312.956.316.672}{1.257.835.587.742} \times 100\% = 28,88\%$$

Dari perhitungan rumus efisiensi di atas dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan
dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Realisasi pendapatan (Rp)	Realisasi belanja (RP)	Persentase
1	2019	35.190.546.895	31.390.530.571	89,20%
2	2020	27.620.861.172	30.510.567.676	110,46%
3	2021	1.257.835.587.742	312.956.316.672	24,88%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan efisiensi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebesar 89,20%, kemudian pada tahun 2020 tingkat efisiensi pengelolaan anggaran mengalami peningkatan yaitu sebesar 110,46% dan Pada tahun 2021 tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebesar 24,88%.

4.2.3 Efektifitas Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Untuk mengetahui efektifitas anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan digunakan rumus Mahsun (2014:187):

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019

$$= \frac{31.390.530.571}{38.799.066.766} \times 100\% = 80,91\%$$

- b. Efektifitas anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020

$$= \frac{30.510.567.676}{32.960.220.463} \times 100\% = 92,22\%$$

- c. Efektifitas anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021

$$= \frac{312.956.316.672}{314.012.708.787} \times 100\% = 99,66\%$$

Dari perhitungan rumus efektifitas di atas dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2019	38.799.066.766	31.390.530.571	80,91%
2	2020	32.960.220.463	30.510.567.676	92,57%
3	2021	314.012.708.787	312.956.316.672	99,66%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebanyak Rp 38.799.066.766 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 31.390.530.571 dengan tingkat persentase 80,91% dari total anggaran dan tahun 2020 anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan 32.960.220.463 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 30.510.567.676 dengan tingkat persentase sebanyak 92,57% dari total anggaran. Pada tahun 2021 anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 314.012.708.787 dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 312.956.316.672 dengan tingkat persentase 99,66% dari total anggaran.

4.2.4 Efektifitas Belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Efektifitas belanja operasi dari anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Realisasi Belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi
1	2019	25.785.224.466	19.133.374.815	6.651.849.651	74,20%
2	2020	30.956.132.463	28.547.931.476	2.408.200.987	92,22%
3	2021	33.167.563.046	32.116.817.431	1.050.745.615	96,83%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat kemampuan aparatur atau tingkat persentase penggunaan belanja operasi sebesar 74,20%, pada tahun 2020 tingkat persentase realisasi penggunaan belanja operasi mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,22%, tahun 2021 tingkat persentasenya sebesar 96,83% artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga hal ini menggambarkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan karena sisa belanja operasi semakin baik.

4.2.5 Efektifitas Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Efektifitas belanja modal dari anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari
tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase Realisasi
1	2019	2.045.942.300	1.881.461.555	164.480.745	91,96%
2	2020	2.004.088.000	1.962.636.200	41.451.800	97,93%
3	2021	441.871.000	440.799.500	1.071.500	99,75%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas mengenai realisasi belanja modal dari anggaran yang disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 tingkat persentase pengelolaan belanja modal yaitu sebesar 91,96% dan pada tahun 2020 tingkat persentase realisasi belanja modal mengalami kenaikan dengan tingkat persentase pada tahun 2020 sebesar 97,93%, pada tahun 2021 tingkat persentase realisasi belanja modal yaitu 99,75%. artinya tingkat efektivitas rasio belanja modal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga hal ini menggambarkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan karena sisa belanja modal semakin baik.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efisiensi Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Efisiensi realisasi pendapatan dan realisasi belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Realisasi Pendapatan Dan Realisasi Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan
dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Realisasi pendapatan (Rp)	Realisasi belanja (RP)	Persentase	Kemampuan Keuangan
1	2019	35.190.546.895	31.390.530.571	89,20%	Cukup Efisien
2	2020	27.620.861.172	30.510.567.676	110,46%	Tidak Efisien
3	2021	1.257.835.587.742	312.956.316.672	22,88%	Sangat Efisien

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan keuangan dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 dapat dikelola dengan cukup efisien karena tingkat persentase yaitu sebesar 89,20 atau jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 35.190.546.895 dan realisasi belanja anggaran Rp 31.390.530.571. Kemudian pada tahun 2020 kemampuan keuangan dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikelola dengan tidak efisien karena tingkat persentase yaitu sebesar 110,46% atau jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 27.620.861.172 dan realisasi belanja anggaran Rp 30.510.567.676. Selanjutnya pada tahun 2021 kemampuan keuangan dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikelola dengan sangat efisien karena tingkat persentase yaitu sebesar 22,88% atau jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 1.257.835.587.742 dan realisasi belanja anggaran Rp 312.956.316.672.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efisiensi penerimaan dan realisasi anggaran di antaranya selama pelaksanaan anggaran proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi kendala hingga

menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada lambatnya realisasi anggaran, sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa sudah dapat dilakukan pada November-Desember di tahun sebelumnya. Namun, seringkali terjadi perubahan, perbaikan, dan sebagainya yang membuat tanda tangan kontrak kegiatan tak bisa dilakukan di awal tahun. Selain itu pengelolaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas lapangan sehingga sistem pencatatan pelaporan yang dibangun dengan baik tidak dapat berjalan dengan maksimal. Tingkat pengetahuan aparatur baik secara alur sistematis pencatatan dan pelaporan atau secara system pelaporan online masih rendah. Penguasaan teknologi informasi khususnya penguasaan dasar-dasar komputer oleh penyuluh masih rendah. Mekanisme pertanggung jawaban anggaran masih banyak dikeluhkan karena dirasakan terlalu rumit dan membutuhkan banyak biaya

4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Efektifitas anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase Realisasi	Kemampuan Keuangan
1	2019	38.799.066.766	31.390.530.571	7.408.536.195	80,91%	Cukup Efektif
2	2020	32.960.220.463	30.510.567.676	2.449.652.787	92,57%	Efektif
3	2021	314.012.708.787	312.956.316.672	1.056.392.115	99,66%	Efektif

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas mengenai realisasi anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa: .

1. Pada tahun 2019 realisasi anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 31.390.530.571 dari total anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 38.799.066.766 dengan tingkat persentase 80,91%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 7.408.536.195 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2019 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan cukup efektif.
2. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 30.510.567.676 dari total anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 32.960.220.463 dengan tingkat persentase 92,57%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 2.449.652.787 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2020 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan efektif.
3. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 312.956.316.672 dari

anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 314.012.708.787 dengan tingkat persentase 99,66%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.056.392.115 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan kurang efektif.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh diantaranya peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa perlu disosialisasikan lebih luas. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang. Ketakutan menggunakan anggaran, yaitu adanya kehati-hatian dari pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan pengadaan mengingat maraknya kasus tipikor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ketakutan ini muncul karena banyaknya pejabat atau pelaksana anggaran diseret kemeja hijau karena terlibat tindak pidana korupsi. Dipengaruhi oleh rasa takut itu banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan.

4.3.3 Analisis Efektifitas Belanja Operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Efektifitas belanja operasi dari anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7

Realisasi Belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase Realisasi	Kemampuan Keuangan
1	2019	25.785.224.466	19.133.374.815	6.651.849.651	74,20%	Kurang Efektif
2	2020	30.956.132.463	28.547.931.476	2.408.200.987	92,22%	Efektif
3	2021	33.167.563.046	32.116.817.431	1.050.745.615	96,83%	Efektif

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas mengenai realisasi belanja operasi dari anggaran yang disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2019 realisasi belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 19.133.374.815 dari total belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 25.785.224.466 dengan tingkat persentase 74,20%, artinya masih ada sisa belanja operasi sebesar Rp 6.651.849.651 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi belanja operasi tahun 2019 Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan efektif.

2. Pada tahun 2020 realisasi belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 28.547.931.476 dari total belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 30.956.132.463 dengan tingkat persentase 92,22%, artinya masih ada sisa belanja operasi sebesar Rp 2.408.200.987 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi belanja operasi tahun 2020 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan efektif.
3. Pada tahun 2021 realisasi belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 32.116.817.431 dari belanja operasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 33.167.563.046 dengan tingkat persentase 96,83%, artinya masih ada sisa belanja operasi sebesar Rp 1.050.745.615 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi belanja operasi tahun 2021 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan efektif.

4.3.4 Analisis Efektifitas Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Efektifitas belanja modal dari anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Realisasi Belanja Modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Aceh Selatan dari
tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase Realisasi	Kemampuan keuangan
1	2019	2.045.942.300	1.881.461.555	164.480.745	91,96%	Efektif
2	2020	2.004.088.000	1.962.636.200	41.451.800	97,93%	Efektif
3	2021	441.871.000	440.799.500	1.071.500	99,75%	Efektif

Sumber : DPPKAD Kabupaten Aceh Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas mengenai realisasi belanja modal dari anggaran yang disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2019 realisasi belanja modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.881.461.555 dari total belanja modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 2.045.942.300 dengan tingkat persentase 92,77%, artinya masih ada sisa belanja modal sebesar Rp 164.480.745 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi belanja modal tahun 2019 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan efektif.

2. Pada tahun 2020 realisasi belanja modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 1.962.636.200 dari total belanja modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 2.004.088.000 dengan tingkat persentase 92,22%, artinya masih ada sisa belanja modal sebesar Rp 41.451.800 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi belanja modal tahun 2020 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan efektif.
3. Pada tahun 2021 realisasi belanja modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 440.799.500 dari belanja modal Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 441.871.000 dengan tingkat persentase 99,75%, artinya masih ada sisa belanja modal sebesar Rp 1.071.500 yang tidak digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Dapat disimpulkan realisasi belanja modal tahun 2021 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik, merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 dengan tingkat kemampuan keuangan cukup efisien disebabkan adanya kebutuhan yang harus dilakukan atau dilaksanakan pada tahun 2019 baik dari segi fisik maupun non fisik, kemudian pada tahun 2020 penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh dengan tingkat kemampuan keuangan tidak efisien dan pada tahun 2021 penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh dengan tingkat kemampuan keuangan sangat efisien. Artinya penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019-2021 dengan kemampuan keuangan daerah berfluktuasi (penurunan dan peningkatan).

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja di tahun-tahun selanjutnya, dan disarankan mengadakan pelatihan kerja kepada aparatur agar lebih efektif dalam menyusun anggaran atau mengelola keuangan daerah.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam hal realisasi anggaran yaitu dengan meningkatkan kemampuan aparatur instansi dengan mengadakan pelatihan kepada aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Bonaraja Purba, dkk (2021). Teori Penganggaran Perusahaan. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Auliana, W. (2020). Analisis Perencanaan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2018. *Artikel Thesis Mahasiswa Prodi Manajemen*
- Bastian. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Modul.
- Drs. H. Nasir Asman, M.M (2022). Anggaran Perusahaan. Penerbit Adab. CV. Adanu Abimata : Jawa barat. Hlm.7.
- Halim, (2018), Akuntansi Sektor Publik akuntansi keuangan daerah Edisi Pertama, Salemba Empat: Jakarta.
- Halkadri Fitra, (2019). Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Penerbit CV IRDH : Malang. Hlm 36.
- Harahap, M. I. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Journal of Islamic Accounting Competency*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-12.
- Hasanah dan Fauzi, (2017). Akuntansi Pemerintah. Penerbit Inmedia. Jakarta.
- Hasanah, N. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Skripsi thesis, Universitas Panca Marga Probolinggo*.
- Hidayat, M. T. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* Vol. 27 No. 1, Hal 1-13.
- Hutapea, R.S. (2020). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 1-19.
- Jessika, F. (2020). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.15, No. 1, Hal 131-138.
- Layuk, P.K.A. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Vol. 4, No. 1, Hal: 33-43
- M. Fuad, Edy Sukarno, dkk. (2020). Anggaran Perusahaan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

- Mahsun, Mohammad, (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi pertama. BPFE Yogyakarta.
- Mardismo, (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi : Yogyakarta. Hlm. 5.
- Monika Handayani, (2019). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Poliban Press:Banjarmasin Utara,Yogyakarta. Hlm. 2.
- Noveka, D. (2021). Analisis Penyusunan Anggaran Beserta Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019. *Jurnal Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 89 ayat (2) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Jakarta.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pramita, P. R. (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Renyowijoyo, Muindro. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Setiani, T. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.1, No. 1, Hal 1-13.
- Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 Tentang Keuangan Negara: Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 51 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Jakarta.